BAB I

PENDAHLUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan kebebasan berpendapat bagi warga negara, demokrasi sebagai langkah untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, kritis dan kreatif dalam menyatakan maupun menerima pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Demokrasi merupaka kebebasan bagi masyarakat untuk memilih maupun dipilih, artinya setiap warga negara bebas memilih maupun dipilih sebagai pemimpin.

Pada era demokrasi saat ini banyak tantangan bagi Bangsa Indonesia, karena tidak semua lapisan masyarakat siap menerima demokrasi tersebut. Demokrasi menuntut mayarakat untuk bijak dalam segala hal terutama dalam menyatakan pendapat maupun menerima pendapat atau kritikan. Demokrasi merupakan kebebasan bagi masyarakat untuk berpendapat namun tidak semua masyarakat mau melakukan hal itu, bahkan tidak semua masyarakat paham arti sesungguhnya demokrasi.

Pemilihan umum merupakan bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dibidang politik. Pemilihan umum dilaksanakan untuk meningkatkan peran masyrakat dan mewujudkan kedaulatan, sebab masyarakat tidak mungkin memerintah secara langsung tanpa adanya seorang pemimpin. Pemilihan umum di Indoenasia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1999, 2004, 2009, dan 2014, dalam perjalanannya meliliki sejarah bagi Bangsa Indonesia.

Pelaksanaan pemilu tahun 1955 menentukan suatu sistem yang peling cocok bagi Bangsa Indonesia, dimana pada tahun tersebut untuk pertama kalinya pemilu dilaksanakan di Indonesia dengan tidak membatasi partai politik untuk ikut serta.

Perjalanan pelaksanaan pemilu selanjutnya terjadi pada masa orde baru dimana pada pelaksanaannya hanya diikuti oleh 2 partai dan satu Golongan Karya, tentunya pada pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya pengaruh pemerintahan saat itu khususnya pengaruh dari Presiden Soeharto. Pemilihan umum saat ini mengalami perubahan, hal ini terlihat dari adanya pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan kepala daerah secara serentak. Hal ini mengingatkan kita pada sejarah baru pelaksanaan pemilu di indonesia.

Pemilihan umum tahun 2004 merupakan sejarah baru Bangsa Indonesia, dimana rakyat mempunyai hak untuk memilih Presiden secara langsung, dan mempunyai hak juga untuk memilih kepala daerahnya, dimana sebelumnya yang menentukan kepala daerah adalah DPRD.

Pemilihan umum memiliki andil yang cukup besar dalam demokrasi yang berjalan di Indonesia, karena keberhasilan suatu negara demokrasi dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemilihan umum dinegara tersebut. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau biasa disingkat dengan PILKADA dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia untuk memilih pemimpim di daerahnya masing-masing. Pemilihan Kepala Daerah memiliki ciri khas tersendiri, yaitu memberikan hak bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan ditiap daerah.

Pilkada sebagai sarana penting bagi setiap masyarakat untuk menentukan nasib daerahnya, dengan adanya pilkada ini menunjukan bahwa rakyat yang ada didaerah peduli terhadap kemajuan daerahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pilkada pada awalnya dilaksanakan oleh tiap daerah dengan waktu yang berbeda dengan daerah lainnya. Namun dengan adanya Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 dan yang saat ini telah diubah menjadi Undang-undang republik indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota yang disahkan oleh DPR, berdasarkan undang-undang tersebut pada tahun 2015 Indonesia mengadakan pilkada serentak dengan total 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota yang akan menggelar Pilkada akhir tahun 2015.

Pilkada serentak tahun 2015 lalu merupakan pilkada serentak yang baru pertama kalinya dilaksanakan Negara Indonesia. Tujuan dilaksanakannya pilkada serentak ini adalah agar terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran. Pada tahun 2018 ini akan dilaksanakan pula pilkada serentak pada bulan Juni tahun 2018. Dimana pelaksanaan pilkada serentak ini dilaksanakan dibeberapa daerah, dimana salah satu daerah yang ikut serta dalam pelaksanaan pemilu tersebut adalah Kota Bandung. Pelaksanaan pilkada di Kota Bandung disebut juga dengan Pilwako Bandung.

Pilwako Bandung tahun 2018 ini adalah untuk memilih Wali Kota dan Wakil Kota Badung. Pilwako Badung kali ini diikuti oleh Tiga pasangan kandidat yaitu pasangan Nurul Arifin–Chairul Yakin Hidayat, Pasangan Yossi Iriyanto-Aries Supriatna dan pasangan Oded M Daniel–Yana Mulyana. Masing-masing

pasangan di dukung oleh sejumlah partai politik yang mendapatkan suara atau memiliki kursi di lembaga legislatif Kota Bandung.

> Tentunya setiap calon Wali Kota Bandung Tahun 2018 ini memiliki partai pengusung. Dikutip dari harian Fikiran Rakyat pasangan nomor urut Satu Nurul Arifin–Chairul Yakin Hidayat, diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat, Pasangan Nomor urut Dua Yossi Iriyanto-Aries Supriatna, diusung oleh Partai PDIP, NASDEM, Hanura dan PPP dan pasangan Nomor urut Tiga Oded M Daniel–Yana Mulyana, diusung oleh Partai PKS dan Gerindra. (Fikiran Rakyat, 12 Februari 2018).

Calon wali Kota Bandung secara serentak sudah melakukan kegiatan kampanye untuk mensosialisasikan visi dan misi serta program kerjanya melalui sepanduk yang tersebar dikota bandung. Kampanye juga dilakukan melalui dua cara yaitu, pertama, kampanye secara langsung dan terbuka melalui kunjungan dan tatap muka secara langsung dengan masyarakat pemilih; dan kedua, kampanye secara tidak langsung dan bersifat tertutup melalui iklan politik. Lewat iklan politik ini, para kandidat berkampanye untuk menyampaikan visi dan misi dengan memanfaatkan media massa baik media cetak maupun media elektronik.

Pemilihan Wali Kota Bandung tahun 2018 ini muncul isu bertambahnya jumlah pemilih di Kota Bandung, dalam penambahan tersebut terdapat orang-orang yang baru pertama kalinya baru pertama kali mengalami pemilihan wali kota bandung, mereka ini disebut dengan pemilih pemula. Pemilih pemula yang menjadi isu menarik saat ini adalah mereka yang baru berumur 17 tahun atau baru disebut dengan anak baru gede, mereka pada umumnya rata-rata merupakan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tentunya seorang pemilih pemula itu punya cara pikir tersendiri hal ini bisa dilihat dari cara mereka yang belum terbiasa dengan adanya pemilihan umum, hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh- pengaruh dari lingkungan sekitar, lewat

pergaulan dari teman-teman, ada juga calon pemilih pemula ini juga melihat cara pendekatan dari para kandidat Calon Kepala Daerah baik dari sepanduk yang terpajang maupun pada iklan dimedia sosial dan rasa ingin tahu mereka.

Pemilih pemula merupakan bagian dari masyarakat kota bandung yang mengikuti pelaksanaan pilkada Kota Bandung dan suatu saat akan menjadi pengganti generasi tua di kota bandung. Pemilih pemula harus menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas karena mereka sudah pasti memiliki informasi dan pengetahuan yang banyak tapi hal itu harus didukung oleh tatacara bergaul karena jika salah maka akan mempengaruhi hingga tidak peduli dengan partisipasinya sebagai warga Kota Bandung.

> "Pemilih yang di dalamnya ada pemilih pemula merupakan pemilih yang potensial. Karena pemilih pemula adalah subjek partipasi dan bukan objek mobilisasi. Jika kita sandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset pe-masaran Frontiers atas 2.500 pemilih pemula di lima kota besar di Indonesia mengungkapkan mereka condong memilih partai-partai besar, hal ini dikarenakan mereka terdoktrin oleh media sosial yang berkembang". (Riset pemasaran Frontiers, 2015)

Berdasarkan data yang diperoleh dari komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kota bandung melalui pemaparannya pada Media menyebutkan bahwa jumlah pemilih pemula yang memiliki hak pilih cukup besar dan pada pemlihan Wali Kota Bandung tahun ini bertambah. Jumlah pemilih pemula tersebut tentunya membawa dampak yang berpengaruh pada kemenangan seorang kontestan atau calon dan sebagai bentuk adanya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah

mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan Pemilukada). Sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih (*voting*) pada pemilu sebelumnya. Namun, ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik, namum mereka tetap melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih masih ada yang belum memiliki jangkauan politik untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula sering hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi untuk kepentingan politiknya, misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan pembentukan organisasi underbow partai.

Pemilih pemula biasanya memiliki karakteristik yang masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Adapun tempat belajar politik tersebut yaitu, pertama keluarga. Di dalam lingkungan keluarga mereka belajar berdemokrasi pertama kali, faktor keluarga sangat mempengaruhi cara pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk pendidikan politik diperoleh pertamakali dari keluarga. Keluarga mempunyai

kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional, sehingga faktor orang tua bisa membentuk perilaku pemilih mereka.

Pemilih pemula mudah terpengaruh teman sebaya atau sepermainan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Teman sebaya dipercaya tidak hanya bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan positif tetapi juga mempengaruhi persepsi dan tindakan negatif. Sehingga kecenderungan perilaku politiknya berpotensi homogen dengan perilaku politik teman dekatnya. Ketiga, media massa. Media massa terutama televisi mampu menyajikan sumber informasi politik kepada khalayaknya secara efektif dan efisien, dalam hal ini para remaja atau pemilih pemula dalam sehari bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi, (meskipun tidak selalu menonton program yang berkaitan dengan politik).

Pengetahuan politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih lainnya. Perilaku pemilih masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menjatuhkan pilihan politiknya jika ditinjau dari studi voting behaviors. Namun yang membedakan pemilih pemula dan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu. Preferensi yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-rubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya.

Hal itu penting karena pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpin di daerah tertentu. Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa akan

datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah diberikan wawasan politik dan demokrasi secara benar baik dari suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.Maka pemilih pemula masih terbuka menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam menentukan pemimpin di Indonesia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bandung melalui wawancara di Merdeka.com pada 10 April 2018, jumlah pemilih pemula di Kota Bandung sendiri yakni sebanyak 153.006 atau 9,27 % dari total 1.659.017 pemilih yang memiliki hak suara. Hal ini berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS), jumlah ini mengalami peningkatan dan akan terus bertambah berdasarkan data yang dikeluarkan oleh disdukcapil kota bandung 2018. Melihat dari hal tersebut maka saya ingin meneliti tingkat pertisipasi pemilih pemula ini, karena hal ini berkaitan erat dengan pembangunan politik karena sesungguhnya kaum mudamerupakan kader bangsa yang akan menggantikan kaum tua.

Berdasarkan Observasi peneliti masih ada pemilih pemula tidak mengerti akan pentingnya partisipasi politik mereka pada pemilihan wali Kota Bandung. Hal ini dikarenakan pemilih pemula di Kota Bandung belum memiliki kesadaran akan hak politiknya sebagai warga negara. Kurangnya kesadaran tesebut dikarenakan pendidikan politik yang mereka terima masih sangat kurang, hal ini bukan tanpa alasan karena pemilih pemula zaman sekarang ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada masalah politik terutama hal-hal yang berkaitan dengan tugas mereka sebagai anak sekolah, walaupun ada sosialisasi tapi mereka tidak mengerti sepenuhnya akan politik.

Masalah pemilih pemula di Kota Bandung saat ini pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dan Lembaga terkait sudah berupaya melakukan sosialisasi mengenai dunia politik khusunya yang berkaitan dengan pemilihan wali Kota Bandung namun hal itu sebenarnya masih kurang tanpa ada pihak yang membantu atau ada pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan kesadaran mereka pada pilkada kota bandung. Namun hal itu bukan justru untuk mengambil keuntungan dari pemilih pemula yang masih kurang pengetahuannya tentang politik dan pilkada serentak sehingga mereka menjadi sasaran empuk untuk dipengaruhi, selama ini sosialisasi terkait pilkada serentak ini. Pentingnya pemilih pemula pada pilwako Bandung tahun ini karena jumlahnya yang mulai bertambah.

Salah satu isu yang menarik dengan adanya pemilih pemula ini adalah karena mereka baru memasuki usia dewasa, mereka belum mengerti dan belum ada kesadaran terhadap partisipasinya terhadap politik. Hal ini disebabkan masih kurang pengetahuan tentang politik. Mereka juga masih belum peka terhadap kebijakan yang dialksanakan pemerintah sehingga membuat mereka tidak peduli terhadap pelaksanaan pemilihan wali kota bandung tahun ini.

Pemilih pemula yang ada di Kota Bandung saat ini juga memiliki status sosial yang berbeda-beda, salah satu contohnya ada yang berasal dari status keluarga mampu dan kurang mampu ada juga mereka yang berstatus pelajar dan bukan pelajar walaupun mereka rata-rata adalah pelajar. Rata-rata mereka yang merupakan siswa sekolah menengah pertama sangat kurang terhadap kesadaran dalam politik hal ini dikarenakan sekolah bukan ranah untuk politik sehingga mereka kurang peka terhadap pelaksanaan pemilihan Wali Kota Bandung ini,

sedangkan mereka yang bekerja cenderung terpengaruh walaupun sedikit terpaksa karena masih labil.

Permasalahan yang terjadi terhadap pemilih pemula ini juga muncul dari aspek keluarga, karena jika keluarga tidak memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pilkada akan mengurangi kepedulian pemilih pemula ini terhadap pelaksanaan pemilihan wali kota bandung, karena saat ini pemilih pemula di kota bandung rata-rata masih ada kontrol dari keluarga sebab mereka masih tinggal bersama orang tua, makanya pada permasalahan ini perlu di ketahui bahwa orang tua merupakan media untuk meningkatkan kepedulian pemilih pemula terhadap pemilihan wali kota bandung tahun 2018.

Masalah yang terjadi untuk terhadap Pemilih pemula saat ini bukan hanya faktor keluarga saja tapi juga ada lingkungan sekitar, yakni adanya sikap tidak peduli terhadap jalannya pemerintahan, penyebabnya adalah karena mereka kurang pengalaman dalam berorganisasi, ini terlihat masih kurang sekali anak sma ikut serta dalam suatu organisasi di masyarakat sekitar, bukan hanya itu saja mereka pun banyak yang tidak mengikuti organisasi di sekolahnya dengan serius, hal ini menjadi penyebab mereka kurang penegetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota Bandung.

Permasalahan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu sudah dikaji dalam berbagai penelitian dengan variabel yang beragam. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut diantaranya adalah penelitian yang disusun oleh Neny Agustin IrmaYuningsih Mahasiswa Jurusan PPKn Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang di publikasikan dalam jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 2

Volume 1 Tahun 2014 yang berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilukada Mojokerto Tahun 2010. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, peneliti ini menggunakan teori dari Sugiono (1999). Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di desa Sumber Tanggul kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto pada pemilukada kabupaten Mojokerto tahun 2010. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) desa Sumber Tanggul pada pemilukada Mojokerto 2010 dilihat dari item keikutsertaan remaja dalam mencoblos/memberikan suara secara langsung tergolong baik/tinggi sebesar 82%. Namun masih terdapat remaja yang golput sebesar 18%. Dalam hal ini tingkat partisipasi politik aktif, sebab dilihat dari jumlah responden hanya 18% remaja yang golput. Sedangkan untuk penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan data dan fakta dilapangan mengenai Partisipasi Politik Pemilih Pemula dikota Bandung dengan mengguanakan teori Ramlan Subekti. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandung.

Kemudian penelitian yang disusun oleh Tia Subekti Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya yang di publikasikan dalam jurnal fakultas ilmu sosial dan politik brawijaya Tahun 2014 yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013. Dengan menggunakan meode penelitian kuantitatif, peneliti ini menggunakan teori dari Sugiono (1999). Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui yang dibahas dalam penelitian

ini, pertama, bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013. Kedua, bagaimana rasionalitas masyarakat dalam partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menjelaskan penelitian ini adalah pertama, terdapat upaya dari KPUD, Partai Politik, Media massa, dan *civil society* dalam meningkatkan partisipasi politik. Kedua, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Sedangkan untuk penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan data dan fakta dilapangan mengenai Partisipasi Politik Pemilih Pemula dikota Bandung dengan mengguanakan teori Ramlan Subekti. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandung.

Penelitian yang disusun oleh Cahyaning Hidayah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman yang di publikasikan dalam eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 4, 2017: 1693-1704 yang berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilukada Kutai Kartanegara Tahun 2015 di Kecamatan Samboja. Dengan menggunakan meode penelitian kuantitatif, peneliti ini menggunakan teori dari Sugiono (1999). Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik dan antusiasme pemilih pemula dalam Pemilukada Kutai Kartanegara yang di laksanakan tahun 2015 di Kecamatan Samboja khususnya di wilayah Kelurahan Kampung Lama, Amborawang Darat, dan Amborawang Laut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Kampung Lama,

Amborawang Darat, dan Amborawang Laut dalam pemberian suara tinggi, sementara dalam kegiatan kampanye dan melakukan diskusi politik belum optimal. Antusiasme pemilih pemula di Kelurahan Kampung Lama, Amborawang Darat, dan Amborawang Laut dalam pemberian suara tinggi, sedangkan dalam kegiatan kampanye dan diskusi politik rendah.

Sedangkan untuk penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan data dan fakta dilapangan mengenai Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Bandung dengan mengguanakan teori Ramlan Subekti. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandung.

Berdasarkan atas fenomena dan permasalahan yang telah terjadi tersebut yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2018".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka saya merumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Wali Kota Bandung tahun 2018 dilihat dari kesadaran politik, penilaian terhadap pemerintah, status sosial, pengaruh keluarga, dan pengalaman organisasi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula Pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2018. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemilih pemula dilihat dari kesadaran politik pemilih pemula.
2. Untuk mengetahui pemilih pemula dilihat dari penilaian terhadap pemerintah, khusunya pemerintahan di kota bandung.
3. Untuk mengetahui pemilih pemula dilihat dari status sosial, Khusunya pada pemilihan wali kota bandung tahun 2018.
4. Untuk mengetahui partisipasi politik dilihat dari aspek aplisiasi keluarga pada pemilihan wali kota bandung tahun 2018.
5. Untuk mengetahui partisipasi politik dilihat dari aspek pengalaman berorganisasi kehususnya para pemilih pemula pada pemilihan wali kota bandung tahun 2018

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan yang bersifat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bidang ilmu pengetahuan terutama pada bidang kajian Politik Masyarakat dan juga diharapkan dapat memberikan pengembangan di bidang Ilmu Pemerintahan khususnya keaktipan

masyarakat dalam bidang politik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti dalam mengetahui permasalahan di masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota Bandung. Penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi masyarakat kota Bandung agar menjadi lebih aktif dalam pemilihan Wali Kota Bandung. Adapun keguanaan secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menghadapi masyarakat maupun panitia pelaksana dalam hal ini komisi pemilihan umum Kota Bandung selama masa studi lapangan

2. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk bahan informasi untuk masyarakat serta dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dalam bentuk saran kepada komisi pemilihan umum Kota Bandung dalam pelaksanaan pilkada.

3. Bagi komisi pemilihan umum Kota Bandung

   Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota Bandung.

4. Bagi Ilmu Pemerintahan

Semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi Ilmu Pemerintahan Unikom agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom di waktu yang akan datang.